

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 per Januari 2000, pemerintah daerah diberi wewenang untuk memungut sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat menggali pendapatan asli daerah sehingga jumlah pendapatan asli daerah menjadi lebih besar daripada jumlah belanja/pembangunan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terjadinya surplus APBD menunjukkan bahwa, ekonomi daerah semakin baik dan dipandang mampu membiayai investasi langsung terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta memberi kesempatan kerja di daerah.

Untuk mendapatkan surplus APBD tergantung pada efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam memungut sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk memungut sumber-sumber pendapatan asli daerah, pemerintah daerah membentuk dan menugaskan instansi yang mengelola pemungutan pendapatan asli daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Surplus APBD terjadi jika pendapatan yang telah dipungut oleh Dinas Pendapatan

Daerah lebih besar dari pendapatan yang dianggarkan sebelumnya. Jika target yang telah dianggarkan tidak tercapai, hal ini berarti kinerja Dinas Pendapatan Daerah kurang efektif.

Kurangnya efektivitas kinerja Dinas Pendapatan Daerah bisa disebabkan oleh berbagai faktor produktivitas para aparat pelaksana pemungutan pajak. Menurut Devas (1989) dalam Y.Joni Pabelum dan Napa J.Awat (2005), penyebab rendahnya produktivitas para aparat pemungutan adalah kecilnya insentif yang diterima oleh para aparat pemungutan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, agar produktivitas aparat pelaksana pemungut pendapatan asli daerah meningkat harus diimbangi dengan meningkatkan kompensasi yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan pendapatan asli daerah, sehingga efektivitas kinerja meningkat dan target APBD dapat tercapai.

Kompensasi yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungut pendapatan asli daerah berupa kompensasi ekstrinsik langsung (insentif, gaji, dll), kompensasi ekstrinsik tidak langsung (tunjangan pensiun, dana kesehatan, dll), serta kompensasi ekstrinsik non finansial (fasilitas kantor yang representatif, kendaraan dinas, dll). Menurut Hasibuan (1994) dalam Apriani Simatupang (2007) menyebutkan bahwa, insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada pegawai tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Tidak hanya insentif saja, pemberian kompensasi yang berupa tunjangan pensiun, kendaraan dinas, dan fasilitas kantor yang representatif juga dapat meningkatkan produktivitas



kinerja. Besar kecilnya kompensasi yang diberikan kepada pegawai harus sesuai dengan kemampuannya menyelesaikan pekerjaan.

Y. Joni Pambelum dan Napa J. Awat (2005) menyatakan bahwa, para karyawan akan termotivasi untuk produktif dalam bekerja jika kompensasi yang diberikan ikut mendukung pekerjaan mereka. Hal ini mengakibatkan setiap individu bersaing melaksanakan prestasi yang terbaik untuk organisasi demi mendapat kompensasi yang sesuai. Oleh karena itu, hal tersebut perlu diberlakukan pada Dinas Pendapatan Daerah dalam kegiatannya memungut sumber-sumber pendapatan asli daerah agar perbaikan kompensasi dapat mendorong produktivitas para aparat pelaksana pemungutan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan Firma Sulistyowati (2005) dengan perbedaan yang terletak pada sampel penelitian. Sampel penelitian Firma Sulistyowati (2005) adalah para Kepala Perangkat daerah yang meliputi Sekretaris Daerah dan Kepala Lembaga Teknis Daerah Yogyakarta, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah semua Kepala bagian dan Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun. Hal ini dikarenakan peneliti ingin membuktikan, apakah hasil penelitian Firma Sulistyowati akan sama jika penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi yang dibentuk dan ditugaskan pemerintah daerah untuk memungut pendapatan asli daerah. Hasil penelitian Firma Sulistyowati (2005) menunjukkan bahwa penghasilan yang meliputi kompensasi ekstrinsik langsung, kompensasi ekstrinsik tidak langsung, dan kompensasi ekstrinsik

non finansial tidak berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Kepala Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membuktikan apakah penghasilan yang meliputi kompensasi ekstrinsik langsung, kompensasi ekstrinsik tidak langsung, dan kompensasi ekstrinsik non finansial berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Dinas Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Penghasilan Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Madiun”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan oleh peneliti maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penghasilan berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Madiun?.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diungkapkan oleh peneliti, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh langsung dari penghasilan yang meliputi kompensasi ekstrinsik langsung, kompensasi ekstrinsik tidak langsung, dan kompensasi ekstrinsik non finansial terhadap efektivitas kinerja pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Madiun.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dalam penerapan teori yang selama ini diperoleh di bangku kuliah kemudian dibandingkan dengan kenyataan di lapangan.

##### 2. Bagi Pembaca

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak lain yang akan mengadakan penelitian di bidang yang sama.

b. Dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompensasi terhadap efektivitas kinerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah, sehingga dapat menambah wawasan yang lebih mendalam sebagai dasar penelitian selanjutnya.

##### 3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara penghasilan dan efektivitas kinerja, sehingga dapat menentukan penghasilan yang layak bagi aparat pemungutan PAD.



## **E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar berfikir dan menganalisis masalah yang ada, kinerja, Dinas Pendapatan Daerah, efektivitas kinerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah, kompensasi, hubungan antara pendapatan dan efektivitas kinerja, dan hubungan antara kompensasi dan efektivitas kinerja. Bab ini juga menjelaskan penelitian sebelumnya, kerangka konseptual, dan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel; instrumen penelitian; lokasi dan waktu penelitian; prosedur pengumpulan data; dan teknik analisis.

### **BAB IV : ANALISIS DATA**

Bab ini menguraikan tentang data penelitian, hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

## BAB V : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran peneliti.